

KEPUTUSAN
SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
SELAKU ATASAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
NOMOR 36 TAHUN 2020

TENTANG

DAFTAR INFORMASI PUBLIK
DAN DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan kewajiban layanan informasi publik perlu ditetapkan daftar informasi public dan daftar informasi yang dikecualikan di lingkungan Kementerian Perindustrian;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Perindustrian selaku atasan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi tentang Daftar Informasi Yang Dikecualikan di Lingkungan Kementerian Perindustrian;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2014;
3. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2014;
4. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 70/M-IND/PER/7/2011 tentang Tata Kelola Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Perindustrian;
5. Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 351/M-IND/Kep/7/2011 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Perindustrian;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Daftar Informasi Publik dan Daftar Informasi Yang Dikecualikan di lingkungan Kementerian Perindustrian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Sekretaris Jenderal ini;
- KEDUA : Daftar Informasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU merupakan pedoman dalam pelaksanaan pelayanan informasi oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Kementerian Perindustrian;
- KETIGA : Daftar Informasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dapat diperbaharui secara berkala;
- KEEMPAT : Keputusan Sekretaris Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 Februari 2020

SEKRETARIS JENDERAL
KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN,
SELAKU ATASAN PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI



ACHMAD SIGIT DWIWAHJONO

SALINAN Keputusan Sekretaris Jenderal ini
disampaikan kepada:

1. Pimpinan Unit Pelaksana Teknis dan Pimpinan Unit Pendidikan di lingkungan Kementerian Perindustrian;
2. Kepala Biro Hukum dan Organisasi.

DAFTAR INFORMASI YANG WAJIB TERSEDIA BERKALA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
TAHUN 2020

No	Jenis Informasi	Detail Informasi	Format Informasi			Penanggung Jawab Pembuatan	Waktu Pembuatan Terakhir	Jangka Waktu Penyimpanan
			HARDCOPY	SOFTCOPY	ONLINE			
PROFILE								
1	Sejarah Badan Publik	Sejarah Badan Publik	V	V	V	Pusdatin	2012	Selamanya
2	Profil Badan Publik	Visi, Misi, Tupoksi, Sejarah, Layanan dan Kompetensi	V	V	V	Biro Humas	2019	Selama masih berlaku
3	Organisasi dan Tata Kerja Kemenperin	Ruang Lingkup dan Tupoksi	V	V	V	Biro OSDM	2019	Selama masih berlaku
4	Struktur Organisasi Kemenperin	Struktur Pejabat Eselon 1 dan 2	V	V	V	Biro OSDM	2019	Selama masih berlaku
5	Profil Pejabat Kemenperin	Profil singkat pejabat struktural Kementerian Perindustrian	V	V	V	Biro OSDM	2019	Selama masih berlaku
6	Profil PPID	Profil singkat PPID Kementerian & Tugas dan tanggung jawab PPID, mekanisme memperoleh informasi, alur pelayanan informasi publik dan organisasi pengelola informasi dan dokumentasi Kemenperin	V	V	V	Biro Humas	2019	Selama masih berlaku
7	Profil Unit Pelayanan Publik Kemenperin	Tugas, Ruang Lingkup, Landasan Hukum dan Asas Pelayanan UPP, Struktur organisasi, proses pengurusan rekomendasi, jenis layanan publik, dan SOP penerbitan rekomendasi	V	-	V	Biro Humas	2019	Selama masih berlaku
8	Laporan Harta Kekayaan Pejabat Kementerian Perindustrian	Laporan LHKP yang telah diperiksa dan diverifikasi	V	V	V	Biro OSDM	2019	1 tahun
9	Daftar Alamat Pejabat Kementerian Perindustrian	Daftar Pejabat Kementerian Perindustrian disertai alamat	V	V	V	Biro Humas	2019	Selama masih berlaku
10	Daftar Alamat Unit Kerja Kemenperin	Daftar alamat unit kerja Kementerian Perindustrian	V	V	V	Biro Humas	2017	Selama masih berlaku
PROGRAM/KEGIATAN								
11	DIPA	Daftar Isian Penyelenggaraan Anggaran : Program dan Kegiatan	V	V	V	Biro Keuangan	2019	1 tahun
12	DIPA APBNP	Merinci besaran alokasi anggaran pada seluruh satker baik di pusat, daerah dan luar negeri	V	V	-	Biro Keuangan	2019	1 tahun
13	Rencana Kerja (RKA-KL)	Daftar rincian rencana pelaksanaan anggaran kegiatan	V	V	V	Biro Perencanaan	2019	1 tahun
14	Rencana Strategis	Rencana Strategis Kementerian Perindustrian tahun 2020 - 2024	V	V	V	Biro Perencanaan	2020	5 tahun
15	Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional 2015-2035	Visi, misi, sasaran, pembangunan sumber daya industri, pembangunan sarana dan prasarana industri, pemberdayaan industri, perwilayah industri, kebijakan alternatif industri kecil dan industri	V	V	V	Biro Perencanaan	2015	20 tahun
16	Reformasi Birokrasi	Visi, misi, sasaran dan program dan kegiatan dalam rangka reformasi birokrasi Kemenperin	-	V	-	Biro Keuangan	2019	Selama masih berlaku
17	Rencana Kinerja (RENKIN)	Rencana Kinerja 2019 ; Daftar Rincian pelaksanaan kegiatan tahun 2019	V	V	V	Biro Perencanaan	2019	3 tahun
18	Rencana Pengadaan	Rencana Pengadaan dengan metode Lelang Umum (Pengadaan Langsung)	-	-	V	Biro Umum	2019	1 tahun
KINERJA								
19	LAKIP di lingkungan Kemenperin	Realisasi anggaran, pencapaian sasaran, dan kendala kegiatan	V	V	V	Biro Perencanaan	2019	1 tahun

No	Jenis Informasi	Detail Informasi	Format Informasi			Penanggung Jawab Pembuatan	Waktu Pembuatan	Jangka Waktu Pemeliharaan
20	TAPKIN	Rencana dan Penetapan Kinerja	V	V	V	Biro Perencanaan	2019	1 tahun
21	Perjanjian Kinerja	Laporan Perjanjian Kinerja di lingkungan Kemenperin	V	V	V	Biro Perencanaan	2019	1 Tahun
22	Laporan Kinerja Industri	Laporan Kinerja Industri	V	V	-	Biro Perencanaan	2019	1 tahun
23	Laporan Triwulan Pengendalian dan Evaluasi Pelaporan Anggaran (PP 39)	Laporan perkembangan dan Evaluasi kinerja per triwulan tahun berjalan	V	V	-	Biro Perencanaan	2019	1 tahun
24	Laporan Survey Kepuasan Masyarakat	Hasil penilaian pihak berkepentingan (pengguna jasa) atas kinerja pelayanan	V	V	V	Biro Hubungan Masyarakat	2019	1 tahun
25	Laporan PPID	Laporan pelayanan informasi publik berupa jumlah permohonan, waktu penyelesaian, jumlah informasi yang diberikan dan ditolak, serta sarana prasarana dalam menunjang layanan informasi	V	V	V	Biro Hubungan Masyarakat	2019	1 tahun
LAPORAN KEUANGAN								
26	Laporan Keuangan Kemenperin	Laporan Realisasi Anggaran, Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan Kementerian Perindustrian yg telah audit	V	V	V	Biro Keuangan	2019	1 tahun
27	Laporan BMN Kemenperin	Laporan Inventaris Barang Milik Negara	V	V	V	Biro Keuangan	2019	1 tahun
28	Laporan Renstra Kemenperin	Laporan Renstra 2015 - 2019	V	V	V	Biro Perencanaan	2019	1 tahun
29	Daftar Aset	Laporan Daftar aset yang dimiliki	V	V	V	Biro Umum	2019	3 tahun
30	Laporan Keuangan Semester I	Catatan atas Laporan Keuangan, Laporan operasional, Lapooran Ekuitas	V	V	-	Biro Keuangan	2019	5 Tahun
31	Laporan Keuangan Semester II	Catatan atas Laporan Keuangan, Laporan operasional, Lapooran Ekuitas	V	V	-	Biro Keuangan	2019	5 Tahun
LAPORAN AKSES INFORMASI PUBLIK								
27	Data Permohonan Informasi Publik (register)	Data Permohonan Informasi Publik (register)	V	V	-	Biro Humas	2019	1 tahun
28	Rekapitulasi PPID Daerah	Rekapitulasi PPID pembantu/pelaksana di satker daerah Kemenperin	V	V	-	Biro Humas	2019	Selama masih berlaku
29	Tata Cara Permohonan Informasi Publik	Tata Cara Permohonan Informasi Publik	V	V	V	Biro Humas	2019	Selama masih berlaku
30	Tata Cara Permohonan Informasi Publik dan Penyelesaian Sengketa Informasi	Tata Cara Permohonan Informasi Publik dan Penyelesaian Sengketa Informasi 2014, 2015, 2016	V	V	V	Biro Humas	2019	Selama masih berlaku
31	Laporan Pelayanan Publik	Laporan pelayanan publik berupa kinerja layanan publik	V	V	V	Biro Humas	2019	1 tahun
PERATURAN								
32	Produk Hukum	Peraturan, keputusan, dan/atau kebijakan yang disahkan oleh Menteri Perindustrian	V	V	V	Biro Hukum	2019	Selama masih berlaku
33	Permenperin No. 29/M-IND/PER/6/2013	Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Kemenperin	V	-	-	Irjen	2019	Selama masih berlaku
34	Perirjen No. 127/IJ-IND/PER/10/2013	Petunjuk pelaksanaan penanganan pengaduan masyarakat di lingkungan Kementerian Perindustrian	V	V	V	Irjen	2019	Selama masih berlaku
35	SK Pengangkatan Kepala, sekretaris, dan Petugas pada Sub Unit Layanan pada Unit Pelayanan Publik Pusat	SK Menperin No. 351/ M-IND/Kep/5/2016, tentang Pengangkatan Kepala, sekretaris, dan Petugas pada Sub Unit Layanan pada Unit Pelayanan Publik Pusat Kemenperin	V	V	V	Biro Humas	2019	Selama masih berlaku
36	SK Tim Penghubung Layanan Informasi Publik	SK Sekjen tentang Pembentukan Tim Penghubung Layanan Informasi Publik.	V	V	V	Biro Humas	2019	Selama masih berlaku

No	Jenis Informasi	Detail Informasi	Format Informasi			Penanggung Jawab Pembuatan	Waktu Pembuatan	Jangka Waktu Berumurat
INFORMASI TENTANG								
37	SOP Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Gedung	Upaya pencegahan dan pemadaman api sejak dini	V	V	V	Romum	2007	Selama masih berlaku
38	SOP Pengoperasian dan Pemeliharaan Peralatan Mekanikal & Elektronikal	Mencakup Standar Pengoperasian dan Pemeliharaan Peralatan Mekanikal & Elektronikal serta langkah kerja	V	V	V	Romum	2007	Selama masih berlaku
39	Pelayanan Publik UP2	Tata Cara dan Alur Pelayanan pada UP2	V	V	V	Biro Humas	2013	Selama masih berlaku
40	Tata Cara Pengaduan	Juknis dan tata cara pengaduan	V	V	V	Irjen	2013	Selama masih berlaku
41	Penerimaan Pegawai	Pengumuman dan proses rekrutment CPNS	V	-	V	Biro OSDM	2017	1 Tahun
42	Grafik Pegawai	Grafik Pegawai Aktif , memasuki masa pensiun , jenis kelamin, pendidikan	V	V	V	Biro OSDM	2019	Selama masih berlaku
43	Kalender Kegiatan	Kalender kegiatan yang dihadiri oleh masyarakat umum / pelaku industri	V	V	V	Biro Humas	2019	1 Tahun

DAFTAR INFORMASI YANG WAJIB TERSEDIA SETIAP SAAT

No	Jenis Informasi	Detail Informasi	Format Informasi			Penanggung Jawab Pembuatan	Waktu Pembuatan Terakhir	Jangka Waktu Penyimpanan
			HARDCOPY	SOFTCOPY	ONLINE			
PERATURAN								
1	Perpres No. 28 Tahun 2008	Kebijakan Industri Nasional	V	V	V	Biro Perencanaan	2011	Selama masih berlaku
2	Himpunan Peraturan P3DN	Peraturan-Peraturan Mengenai Peningkatan Penggunaan Produk dalam Negeri (P3DN) Tahun 2009-2011	V	V	V	Biro Hukum	2012	Selama masih berlaku
3	Himpunan Permenperin tentang SNI Bidang Industri Buku I dan II	Standar Nasional Indonesia (SNI) Bidang Industri Tahun 2009-2012	V	V	V	Biro Hukum	2012	Selama masih berlaku
4	Himpunan Abstrak Permenperin	Himpunan Abstrak Permenperin	V	V	V	Biro Hukum	2019	Selama masih berlaku
5	Himpunan Permenperin di Bidang Industri	Himpunan Peraturan Menteri Perindustrian di Bidang Industri Tahun 2010 dan 2011	V	V	V	Biro Hukum	2011	Selama masih berlaku
6	UU No. 3 Tahun 2014	Tentang Perindustrian	V	V	V	Biro Humas	2014	Selama masih berlaku
7	Tanya Jawab Seputar UU No.14 Tahun 2008 Indonesia	Tanya Jawab Mengenai Keterbukaan Informasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik	V	V	V	KIP	2010	Selama masih berlaku
8	Informasi Publik yang Dikecualikan	Peraturan Mengenai Informasi Publik yang Dikecualikan	V	V	V	KIP	2009	Selama masih berlaku
9	RUU tentang Perindustrian pada Rapat Paripurna DPR RI 19 Desember 2013	Draft RUU Perindustrian yang Merupakan Hasil Rapat Paripurna DPR RI Kamis, 19 Desember 2013	V	V	V	Biro Humas	2013	Selama masih berlaku
10	RUU tentang Perindustrian	Naskah akademis tentang perindustrian sebagai awal pembentukan UU No. 3 Tentang Perindustrian	V	V	V	Biro Hukum	2012	Selama masih berlaku
11	Himpunan Peraturan Bidang Pengawasan	Peraturan-Peraturan sebagai Panduan untuk Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) Kemenperin	V	V	V	Irjen	2013	Selama masih berlaku
12	Perpres No. 28 Tahun 2008	Kebijakan Industri Nasional	V	V	V	Biro Perencanaan	2011	Selama masih berlaku
13	Perpres No. 29 Tahun 2015	Kedudukan dan Organisasi Kementerian Perindustrian	V	V	V	Biro Hukum	2015	Selama masih berlaku
14	PP No. 41 Tahun 2015	Pembangunan Sumber Daya Industri	V	V	V	Biro Hukum	2015	Selama masih berlaku
15	Permenperin 39/M-IND/PER/3/2014 tentang Penilaian Informasi Publik	Penilaian Keterbukaan Informasi Publik pada UPT dan Unit Pendidikan di Lingkungan Kementerian Perindustrian	V	V	V	Biro Humas	2015	Selama masih berlaku
16	PP No. 14 Tahun 2014	Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional	V	V	V	Biro Hukum	2015	Selama masih berlaku
17	PP No. 53 Tahun 2010	Disiplin Pegawai Negeri Sipil	V	V	V	Biro Kepegawaian	2012	Selama masih berlaku
18	Permenperin No. 98/M-IND/PER11/2015	berisikan tentang mekanisme pemberian Tunjangan kinerja bagi pegawai di lingkungan kemenperin berdasarkan Perpres No. 111 Tahun 2015 tentang tunjangan kinerja di lingkungan Kemenperin	V	V	V	Biro Kepegawaian	2016	Selama masih berlaku
19	Permenperin No. 55 Tahun 2010	Unit Pelayanan Publik Kementerian Perindustrian	V	V	V	Biro Humas	2014	Selama masih berlaku
20	Permenperin No. 123/M-IND/PER/12/2014 Tahun 2010	Tata Kelola Daftar Isian pelaksanaan Anggaran Tahun 2015 di Lingkungan Kementerian Perindustrian	V	V	V	Biro Keuangan	2014	Selama masih berlaku
21	UU No. 26 Tahun 2007	Penataan Ruang	V	V	V	Biro Hukum	2007	Selama masih berlaku
22	PP No. 15 Tahun 2010	Penyelenggaraan tata ruang	V	V	V	Biro Hukum	2010	Selama masih berlaku
23	Permenperin No. 97/M-IND/PER/12/2011	Tata kelola Daftar Isian pelaksanaan Anggaran Tahun 2012 di Lingkungan Kementerian Perindustrian	V	V	V	Biro Keuangan	2012	Selama masih berlaku
24	Panduan Umum Pelaksanaan Penelitian, Pengembangan dan Rekayasa Industri di Lingkungan Badan Pengkajian Kebijakan Iklim dan Mutu Industri	Panduan Umum Pelaksanaan Penelitian, Pengembangan dan Rekayasa Industri di Lingkungan Badan Pengkajian Kebijakan Iklim dan Mutu Industri	V	V	V	BPPI	2014	Selama masih berlaku
25	Himpunan PP di Bidang Industri Buku I	Himpunan Peraturan Menteri Perindustrian di Bidang Industri Tahun 2011	V	V	V	Biro Hukum	2011	Selama masih berlaku
26	Himpunan Permenperin Tahun 2010 Buku I dan II	Himpunan Peraturan Menteri Perindustrian Tahun 2010	V	V	V	Biro Hukum	2012	Selama masih berlaku
27	Permenperin 89/M-IND/PER/10/2014	Pedoman Penanganan Pemanfaatan Tenaga Asing dalam rangka Kerjasama Teknik Luar Negeri di lingkungan Kementerian Perindustrian	V	V	V	KPAII	2014	Selama masih berlaku
28	Permenperin 04/M-IND/PER/1/2016	Pameran Luar Negeri di lingkungan Kementerian Perindustrian	V	V	V	KPAII	2016	Selama masih berlaku

No.	Judul Peraturan	Dokumen	Format Informasi			Penanggung	Waktu	Jangka Waktu
29	Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2011	Tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Perindustrian	V	V	V	BPPI	2017	Selama masih berlaku
30	Satuan Biaya Umum (SBU) Kementerian Keuangan	Satuan Biaya Umum (SBU) Kementerian Keuangan	V	V	V	Biro Keuangan	2019	Selama masih berlaku
INFORMASI TENTANG ORGANISASI								
PEDOMAN								
31	Petunjuk Teknis Administrasi Kepegawaian	Rujukan dalam menerapkan ketentuan terkait pelaksanaan administrasi kepegawaian	V	V	V	OSDM	2005	Selama masih berlaku
32	Pedoman Teknis Tata Ruang	Pedoman dalam Menyusun Tata Ruang Kerja/Kantor di Gedung Pusat Departemen Perindustrian	V	V	V	Biro Umum	2007	Selama masih berlaku
33	SOP Pengoperasian dan Pemeliharaan Perlengkapan Gedung	Kaidah dalam mengadakan dan menggunakan perlengkapan di gedung Departemen Perindustrian	V	V	V	Biro Umum	2007	Selama masih berlaku
34	Panduan Penggunaan Logo Kementerian Perindustrian	Panduan Penggunaan Logo Kementerian Perindustrian	V	V	V	Biro Humas	2011	Selama masih berlaku
35	Persyaratan Pengurusan Rekomendasi dan Pertimbangan Teknis	Mekanisme pengajuan dan pengurusan rekomendasi/pertimbangan teknis	V	V	V	Biro Humas	2016	Selama masih berlaku
36	Standar Layanan Informasi Publik	Hak dan kewajiban pemohon dan badan publik, cara memperoleh informasi, prosedur dan mekanisme informasi	V	V	V	Biro Humas	2016	Selama masih berlaku
37	Tatacara Permohonan Informasi Publik & Penyelesaian Sengketa Informasi	Tatacara Permohonan Informasi Publik & Penyelesaian Sengketa Informasi	V	V	V	Biro Humas	2016	Selama masih berlaku
38	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)	Tugas dan wewenang PPID serta alur layanan informasi Publik	V	V	V	Biro Humas	2016	Selama masih berlaku
39	Petunjuk Teknis Program Revitalisasi dan Penumbuhan Industri	Revitalisasi Industri melalui restrukturisasi mesin/peralatan industri tekstil dan produk tekstil serta industri alas kaki Tahun Anggaran 2014, 2015	V	V	V	IKTA	2015	Selama masih berlaku
40	Pedoman Penilaian Penghargaan Industri Hijau Kementerian Perindustrian RI	Pedoman Penilaian Penghargaan Industri Hijau Kementerian Perindustrian RI	V	V	-	BPPI	2018	1 tahun
41	Pedoman Penilaian Pelayanan Publik	Pedoman menjelaskan tentang jenis pelayanan publik dan karakteristik pelayanan publik	V	V	-	Biro Humas	2018	1 tahun
42	Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat	Pedoman menjelaskan tentang kualitas pelayanan publik dan teknik survei	V	V	-	Biro Humas	2017	Selama masih berlaku
43	Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan	Pedoman menjelaskan tentang Konsep, kualitas pelayanan publik, sosialisasi standar pelayanan, penetapan maklumat	V	V	V	Biro Humas	2016	1 tahun
44	Pedoman Teknik Penetapan Budaya Kerja 5K di Lingkungan Departemen Perindustrian	Persekjen No. 02/SJ-IND/2/2009	V	V	V	Biro Hukum	2009	Selama masih berlaku
45	Pedoman Teknis Penerapan Budaya Kerja, 5K di Lingkungan Departemen Perindustrian	Permenperin No. 23/M-IND/PER/2/2009	V	V	V	Biro Hukum	2009	Selama masih berlaku
46	Pedoman Penggunaan Produk dalam Negeri Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	Permenperin No. 49 /M-IND/PER/5/2009	V	V	V	Biro Hukum	2009	Selama masih berlaku
47	Pedoman Pelaksanaan Reviu Laporan Keuangan di Lingkungan Kementerian Perindustrian	Persiapan, Pelaksanaan, dan pelaporan hasil Reviu	V	V	-	Itjen	2018	Selama masih berlaku
48	Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Kementerian Perindustrian	Peraturan Inspektur Jenderal No. 150/IJ--IND/11/2014, Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Pelayanan Publik, Pelaporan Hasil Monitoring dan Evaluasi	V	V	-	Biro Hukum	2017	Selama masih berlaku
49	Pedoman Administrasi Pengelolaan Barang Milik Negara Kementerian Negara	Prosedur administrasi Pengelolaan BUMN	V	V	-	Biro Keuangan	2017	Selama masih berlaku
50	Pedoman Administrasi Umum Kementerian Perindustrian	Jenis dan format naskah dinas, penyusunan naskah, tata surat, pembakuan standar penggunaan bahan pelaralatan naskah dinas serta perlengkapan lainnya, perubahan, pencabutan pembatalan dan ralat naskah dinas	V	V	-	Biro Umum	2017	Selama masih berlaku
51	Pedoman Teknis Pembinaan Pejabat Fungsional Analis Kepegawaian Tingkat Ahli di Lingkungan Kementerian Perindustrian	Peraturan Menteri Perindustrian No. 70/M-IND/PER/8/2015	V	V	-	Biro Kepegawaian	2017	Selama masih berlaku
52	Buku Pedoman Administrasi Pertanggungjawaban Anggaran Tahun Anggaran 2017	Belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, dan Dasar Hukum	V	-	-	Biro Keuangan	2017	Selama masih berlaku
53	Pedoman Penilaian Penghargaan Industri Hijau	Tim Penilai, dokumen kelengkapan, mekanisme penilaian, jadwal pelaksanaan	V	V	V	BPPI	2018	1 tahun
54	Penilaian Prestasi Kinerja Pegawai Negeri Sipil	PP No. 46 Tahun 2011	V	V	-	Biro Kepegawaian	2017	Selama masih berlaku

No	Judul Dokumen	Deskripsi Dokumen	Format Informasi			Penanggung	Waktu	jangka Waktu
			V	V	-			
55	Layanan Informasi Publik Kemenperin	Visi, misi, motto dan maklumat layanan informasi publik	V	V	-	Biro Humas	2016	Selama masih berlaku
56	Junlak dan Juknis Bidang Kepegawaian	Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Bidang Kepegawaian	V	V	-	Biro Kepegawaian	2016	Selama masih berlaku
57	Pedoman Tata Kearsipan Kementerian Perindustrian Manual	berdasarkan permenperin No. 96.1/M-IND/PER/10/2012 tentang pedoman tata kearsipan manual kemenperin	V	V	-	Biro Umum	2012	Selama masih berlaku
58	Pedoman Tata Kearsipan Kementerian Perindustrian Klasifikasi dan Kode	berdasarkan permenperin No. 96.1/M-IND/PER/10/2012 tentang pedoman tata kearsipan klasifikasi dan kode kemenperin	V	V	-	Biro Umum	2013	Selama masih berlaku
59	Permenperin No. 30/M-IND/PER/6/2013	tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil Kementerian Perindustrian	V	V	-	Biro Kepegawaian	2013	Selama masih berlaku
60	Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi bagi pejabat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi pada Badan Publik Negara Tingkat Pusat dan Daerah	Dasar Hukum, Kelembagaan Pengelolaan Informasi dan dokumentasi, Managemen pengelolaan Informasi dan Dokumentasi	V	V	-	KOMINFO	2015	Selama masih berlaku
61	Buku Pedoman Jadwal Retensi Arsip	meliputi pedoman fasilitatif dan petunjuk penyusutan arsip baik dimasa lampau, sekarang, atau yang akan datang.	V	V	-	Biro Umum	2013	Selama masih berlaku
62	Pedoman Teknis Pembinaan Pejabat Fungsional Analisis Kepegawaian Tingkat Ahli di Lingkungan Kementerian Perindustrian	berisikan tentang Permenperin No. 70/M-IND/PER/8/2015	V	V	-	Biro Kepegawaian	2015	Selama masih berlaku
63	Pedoman Teknis Pembinaan Pejabat Fungsional Analisis Kepegawaian Keterampilan di Lingkungan Kementerian Perindustrian	berisikan tentang Permenperin No. 10/M-IND/PER/2/2016	V	V	-	Biro Kepegawaian	2016	Selama masih berlaku
64	Keterbukaan Informasi Publik dan pelaksanaan UU no. 14 Tahun 2008	UU No. 14 dan Permen No. 61 Tahun 2010	V	V	-	KOMINFO	2015	Selama masih berlaku
65	Pedoman Tata Kelola BMN	tentang perubahan tata kelola dan administrasi Barang Milik Negara	V	V	-	BPPI	2015	Selama masih berlaku
66	Surat-surat perjanjian	Nota Kesepahaman (MOU) tentang Kelitbangan, standardisasi, sertifikasi dan pengujian	V	-	-	Balai Besar - Baristand	2019	Selama masih berlaku
67	Informasi Terdokumentasi Baristand Industri Samarinda	Kebijakan, SOP, Instruksi Kerja dan Formulir penyelenggaraan sistem manajemen mutu Baristand Samarinda sesuai : SNI ISO 9001, SNI ISO/IEC 17025, SNI ISO/IEC 17065	V	-	-	Balai Besar - Baristand	2019	4 Tahun
68	Standar Layanan Publik	SK Penetapan Standar Pelayanan di Baristand Industri Samarinda	V	-	-	Biro Humas	2019	Selama masih berlaku
69	Mekanisme Permohonan Informasi Publik	SOP Permohonan, Informasi Publik; SOP Penyelesaian Sengketa Informasi Publik; SOP Pengajuan Keberatan Pelayanan Informasi Publik; SOP Pelaporan Informasi Publik	V	V	V	Biro Humas	2019	Selama masih berlaku
70	Daftar Informasi publik	Daftar informasi publik, wajib tersedia setiap saat, Wajib diumumkan secara berkala, Wajib Diumumkan Serta Merta, Informasi yang dikecualikan	V	V	V	Biro Humas	2019	Selama masih berlaku
71	Pengelolaan Informasi Publik	SK Tim pengelola Informasi Publik	V	V	V	Biro Humas	2019	Selama masih berlaku
72	SOP Pengendalian Informasi Terdokumentasi	Tata cara pengendalian informasi terdokumentasi	V	V	-	OSDM	2018	Selama masih berlaku
73	SOP Rencana Perubahan	Prosedur membuat rencana perubahan	V	V	-	OSDM	2018	Selama masih berlaku
74	SOP Audit Internal	Juknis dan tata cara audit internal	V	V	-	UPT	2018	Selama masih berlaku
75	SOP Tinjauan Manajemen	Juknis dan tata cara pelaksanaan tinjauan manajemen	V	V	-	UPT	2018	Selama masih berlaku
76	SOP Tindakan Perbaikan dan Pencegahan	Tata cara tindakan perbaikan dan pencegahan	V	V	-	UPT	2018	Selama masih berlaku
77	SOP Pengendalian Ketidaksesuaian	Juknis pengendalian ketidaksesuaian	V	V	-	UPT	2018	Selama masih berlaku
78	SOP Penanganan Keluhan Pelanggan	Juknis dan tata cara penanganan keluhan pelanggan	V	V	-	OSDM	2018	Selama masih berlaku

No	Isi Informasi	Detail Informasi	Format Informasi			Penanggung	Waktu	Jangka Waktu
79	SOP Sasaran Mutu	SOP sasaran mutu	V	V	-	UPT	2018	Selama masih berlaku
80	SOP Penilaian Resiko	SOP penilaian resiko	V	V	-	OSDM	2018	Selama masih berlaku
81	SOP Pengetahuan Organisasi	SOP Pengetahuan Organisasi	V	V	-	OSDM	2018	Selama masih berlaku
82	SOP Pelatihan Pegawai	SOP Pelatihan Pegawai	V	V	-	OSDM	2018	Selama masih berlaku
83	SOP Satpam dan Keamanan	SOP dan Juknis bagi satpam	V	V	-	UPT	2018	Selama masih berlaku
84	SOP Tugas Belajar	juknis bagi karyawan yang mendapat tugas belajar	V	V	-	OSDM	2018	Selama masih berlaku
85	SOP Pembayaran Uang Makan dan Lembur	SOP Pembayaran Uang Makan dan Lembur	V	V	-	Biro Keuangan	2018	Selama masih berlaku
86	SOP Pembuatan Daftar Gaji	SOP Pembuatan Daftar Gaji	V	V	-	Biro Keuangan	2018	Selama masih berlaku
87	SOP Sistem Akuntansi Keuangan	juknis sistem akuntansi keuangan	V	V	-	Biro Keuangan	2018	Selama masih berlaku
88	SOP Penyusunan Anggaran	juknis penyusunan anggaran	V	V	-	Biro Perencanaan	2018	Selama masih berlaku
89	SOP Aplikasi Penarikan Satker	juknis aplikasi penarikan satker	V	V	-	Biro Keuangan	2018	Selama masih berlaku
90	SOP Bendahara Penerimaan	juknis bendahara penerimaan	V	V	-	Biro Keuangan	2018	Selama masih berlaku
91	SOP Bendahara Pengeluaran	juknis bendahara pengeluaran	V	V	-	Biro Keuangan	2018	Selama masih berlaku
92	SOP Penyusunan RENJA	juknis penyusunan RENJA	V	V	-	Biro Perencanaan	2018	Selama masih berlaku
93	SOP Penyusunan RENSTRA	juknis penyusunan RENSTRA	V	V	-	Biro Perencanaan	2018	Selama masih berlaku
94	SOP Penyusunan LAKIP	juknis penyusunan LAKIP	V	V	-	Biro Perencanaan	2018	Selama masih berlaku
95	SOP Surat dan Arsip	pengelolaan surat dan arsip	V	V	-	Biro Umum	2018	Selama masih berlaku
96	SOP Pengelolaan Kebersihan	SOP pengelolaan kebersihan	V	V	-	UPT	2018	Selama masih berlaku
97	SOP Rumah Tangga	prosedur pengelolaan rumah tangga	V	V	-	UPT	2018	Selama masih berlaku
98	SOP Pengaturan Jadwal Pemakaian Kamar Wisma dan Ruang Kelas	prosedur pengaturan jadwal kamar wisma dan ruang kelas	V	V	-	BDI	2018	Selama masih berlaku
99	SOP Penerimaan Barang ke Gudang	tata cara penerimaan barang ke gudang	V	V	-	UPT	2018	Selama masih berlaku
100	SOP Pelayanan Tamu Kantor	tata cara pelayanan tamu kantor	V	V	-	UPT	2018	Selama masih berlaku
101	SOP Emon dan PP39	juknis Emon dan PP39	V	V	-	Biro Keuangan	2018	Selama masih berlaku
102	SOP Laporan Absensi Bulanan	pembuatan laporan absensi bulanan	V	V	-	OSDM	2018	Selama masih berlaku
103	SOP Akuntansi BMN	SOP akuntansi BMN	V	V	-	Biro Keuangan	2018	Selama masih berlaku
104	SOP Pemeriksaan Kondisi Sarana dan Prasarana	juknis pemeriksaan kondisi sarana dan prasarana	V	V	-	UPT	2018	Selama masih berlaku
105	SOP DUK dan DSP	SOP DUK dan DSP	V	V	-	OSDM	2018	Selama masih berlaku

No.	Judul Informasi	Detail Informasi	Format Informasi			Penanggung	Waktu	Jangka Waktu
106	SOP Penerbitan Surat Tugas dan SPPD	juknis dan tata cara penertiban surat tugas dan SPPD	V	V	-	OSDM	2018	Selama masih berlaku
107	SOP DP3	juknis pembuatan DP3	V	V	-	OSDM	2018	Selama masih berlaku
108	SOP Kartu Kepegawaian	juknis pembuatan kartu kepegawaian	V	V	-	OSDM	2018	Selama masih berlaku
109	SOP BPJS	juknis pembuatan kartu BPJS	V	V	-	OSDM	2018	Selama masih berlaku
110	SOP Taspen	juknis pengurusan Taspen	V	V	-	OSDM	2018	Selama masih berlaku
111	SOP Karis dan Karsu	juknis pembuatan karis dan karsu	V	V	-	OSDM	2018	Selama masih berlaku
112	SOP Kenaikan Gaji Berkala	prosedur kenaikan gaji berkala	V	V	-	OSDM	2018	Selama masih berlaku
113	SOP Kenaikan Pangkat Reguler	prosedur kenaikan pangkat reguler	V	V	-	OSDM	2018	Selama masih berlaku
114	SOP Permohonan Cuti PNS	prosedur Permohonan Cuti PNS	V	V	-	OSDM	2018	Selama masih berlaku
115	SOP Pemberhentian dan Pensiun	Prosedur Pemberhentian dan Pensiun PNS	V	V	-	OSDM	2018	Selama masih berlaku
116	SOP Tunjangan Kinerja Pegawai	Juknis Tunjangan Kinerja Pegawai	V	V	-	Biro Keuangan	2018	Selama masih berlaku
117	SOP Pengadaan Barang	Juknis Pengadaan Barang	V	V	-	Biro Umum	2018	Selama masih berlaku
118	SOP Perancangan Program	Juknis Perancangan Program	V	V	-	Biro Perencanaan	2018	Selama masih berlaku
119	SOP Evaluasi & Perancangan Penyelenggara Diklat	prosedur evaluasi dan perancangan penyelenggara diklat	V	V	-	BDI	2018	Selama masih berlaku
120	SOP Penyusunan Program & Pengelolahan Administrasi Pra Diklat	prosedur penyusunan program dan pengelolaan administrasi pra diklat	V	V	-	BDI	2018	Selama masih berlaku
121	SOP Pengelolaan Data & Administrasi Diklat	prosedur pengelolaan data dan administrasi diklat	V	V	-	BDI	2018	Selama masih berlaku
122	SOP Pelaksanaan Rekrutmen Peserta Diklat	prosedur pelaksanaan rekrutmen peserta diklat	V	V	-	BDI	2018	Selama masih berlaku
123	SOP Monitoring & Evaluasi Penyelenggaraan Diklat	prosedur monitoring dan evaluasi penyelenggaraan diklat	V	V	-	BDI	2018	Selama masih berlaku
124	SOP Kerjasama Alumni	prosedur kerjasama alumni	V	V	-	UPT Pendidikn	2018	Selama masih berlaku
125	SOP Penempatan Alumni	prosedur penempatan alumni	V	V	-	UPT Pendidikn	2018	Selama masih berlaku
126	SOP Inkubasi Bisnis	prosedur inkubasi bisnis	V	V	-	UPT Pendidikn	2018	Selama masih berlaku
127	SOP Penyusunan Kurikulum & Modul Diklat	prosedur penyusunan kurikulum dan modul diklat	V	V	-	BDI	2018	Selama masih berlaku
128	SOP Penyusunan KTI	prosedur penyusunan KTI	V	V	-	BDI	2018	Selama masih berlaku
129	Modul Pembuatan Aneka Olahan Berbasis Komoditi Unggulan	silabus, buku informasi, buku kerja, buku penilaian	V	V	-	UPT	2018	Selama masih berlaku
130	Modul Desain Kemasan Produk Pangan	silabus, buku informasi, buku kerja, buku penilaian	V	V	-	BDI	2018	Selama masih berlaku
131	Perangkat Asesmen Uji Kompetensi	formulir, materi uji kompetensi, skkni	V	V	-	BDI	2018	Selama masih berlaku

No	Judul Informasi	Detail Informasi	Format Informasi			Penanggung	Waktu	Jangka Waktu
132	Informasi Terdokumentasi Balai Besar Industri Hasil Perkebunan	Kebijakan, SOP, Instruksi Kerja dan Formulir penyelenggaraan sistem manajemen mutu Balai Besar Industri Hasil Perkebunan sesuai : SNI ISO 9001, SNI ISO/IEC 17025, SNI ISO/IEC 17065.	V	-	-	Balai Besar - Baristand	2019	4 Tahun
PRESTASI								
133	Direktori Industri Hijau	Profil perusahaan yang memiliki keunggulan dalam penerapan industri hijau	V	V	-	BPPI	2019	1 tahun
134	Piagam Kementerian Terbaik dalam Keterbukaan Informasi Publik	Piagam Penghargaan dari KIP	V	V	Piagam	KIP	2019	1 tahun
135	Piagam Kementerian Kepatuhan Tinggi Standar Pelayanan Publik	Piagam Penghargaan dari Ombudsman	V	V	Piagam	Ombudsman	2019	1 tahun
136	Piagam Kementerian Terbaik Akuntabilitas Kinerja	Piagam Penghargaan dari Menpanrb	V	V	Piagam	Menpan	2019	1 tahun
137	Piagam Perpustakaan RI	Piagam Penghargaan dari Perpustakaan Nasional	V	V	Plakat dan Piagam	Perpustakaan RI	2019	1 tahun
138	Piagam Penghargaan Arsip Nasional RI	Piagam Penghargaan dari Arsip Nasional RI						
139	Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Laporan Keuangan Kementerian Perindustrian	Opini WTP Laporan Keuangan Tahun 2016 sd 2019	V	V	Piagam	Biro Keuangan	2019	1 tahun
140	Penghargaan Wilayah Bebas Korupsi (WBK)	Penghargaan satker yang memperoleh wilayah Bebas Korupsi (WBK)	V	-	-	Kementerian PAN dan RB	2019	Selama masih berlaku
141	Kearsipan	Arsip Teladan kategori pengelolaan center file terbaik atas nama Zainuddin Masfut ; Unit Kearsipan Daerah Terbaik II	V	-	-	UPT	2017	Selama masih berlaku
PUBLIKASI								
142	Jurnal Riset Industri	Hasil penelitian dan kajian para peneliti di lingkungan Kemenperin	V	-	V	BPPI	2015	Selama masih berlaku
142	Facts and Figures	Peran pemerintah dalam peningkatan industri berupa pemberian kebijakan (target : para pemangku kebijakan)	V	V	V	Biro Humas	2017	Selama masih berlaku
142	Media Industri	Potret kemandirian industri nasional : Siap terapkan Industri 4.0 ; Industri Potomotif melambung	V	V	V	Biro Humas	2018	Selama masih berlaku
142	KINA	Potret karya produksi Indonesia : Menjadi tuan rumah di negeri sendiri; Mahakarya Kerajinan Tenun Nusantara.	V	V	V	Biro Humas	2018	Selama masih berlaku
142	Guntingan Pers	Kliping berbagai koran terkait pemberitaan di sektor industri khususnya Kemenperin	V	V	V	Biro Humas	2019	1 tahun
142	Siaran Pers	Siaran Pers terkait kebijakan/data/informasi terkait sektor industri	V	V	V	Biro Humas	2019	1 tahun
142	Daftar Tajuk Subjek Industri	Pedoman dalam Menentukan Subjek Khusus Bidang Industri (Tesaurus Industri)	V	V	-	Biro Humas	2016	Selama masih berlaku
142	Katalog Pustaka industri 2016	Berisikan data tentang SNI dan beberapa koleksi perpustakaan	V	V	-	Biro Humas	2016	Selama masih berlaku
142	Katalog Buku Perpustakaan 2016	Berisikan data Koleksi Buku Perpustakaan yang terbaru	V	V	-	Biro Humas	2016	Selama masih berlaku
142	Katalog SNI 2017	Berisikan data Koleksi SNI Perpustakaan	V	V	V	Biro Humas	2017	Selama masih berlaku
142	Solusi	Majalah Pengawasan Kementerian Perindustrian	V	V	V	Itjen	2018	Selama masih berlaku
142	Perpustakaan	Daftar koleksi buku dan data/informasi perpustakaan	V	-	-	Biro Umum	2019	Selama masih berlaku
142	Direktori Perusahaan pada LSPro	Daftar nama perusahaan yang telah memperoleh SPPT SNI	V	V	V	BPPI	2019	1 tahun
142	Video Gallery	Video tentang kegiatan	V	V	V	UPT	2019	Selama masih berlaku
142	Dokumentasi Pelaksanaan Kegiatan diklat	Dokumentasi/foto-foto pelaksanaan kegiatan berupa ceremonial dan proses belajar	-	-	V	BDI Medan	2018	Selama masih berlaku
142	Kegiatan Kementerian Perindustrian yang di koordinasikan oleh BDI Medan	Kegiatan yang merupakan bagian dari kegiatan Pusat (Kementerian Perindustrian) namun di tindaklanjuti oleh BDI Medan	-	-	V	BDI Medan	2018	Selama masih berlaku

		Detail Informasi	Format Informasi			Penanggung	Waktu	Jangka Waktu
DIREKTORI								
143	Daftar Nama dan Alamat Pejabat	Daftar Nama dan Alamat Pejabat di lingkungan Kementerian Perindustrian	V	V	V	Biro Humas	2018	Selama masih berlaku
144	Buku Profil Anggota Komisi IV DPR RI	Profil anggota DPR RI Komisi VI masa sidang V 2018	V	V	-	IKTA	2018	Selama masih berlaku
HASIL LITBANG								
145	Jurnal Ilmiah Hasil Penelitian Industri (Jurnal HPI)	Laporan dan Informasi tentang Laporan HPI	V	V	V	Balai Besar - Baristand	2017	Selama masih berlaku
146	Teknologi Tepat Guna	Data dan laporan TTG	V	V	V	Balai Besar - Baristand	2019	Salama masih berlaku
147	Laporan Pameran Hasil Litbang	Laporan hasil pameran, cetakan leaflet, baliho dan brosur	V	V	V	Balai Besar - Baristand	2019	1 tahun
148	Laporan Sosialisasi Potensi Balai Baristand	Laporan hasil sosialisasi Potensi Balai	V	V	V	Balai Besar - Baristand	2019	1 tahun
149	Kumpulan abstrak hasil litbang	Kumpulan abstrak hasil litbang para peneliti	V	V	V	Balai Besar - Baristand	2019	Selama masih berlaku
150	Buku Profil Litbang Komoditas	Hasil penelitian dan kajian komoditas para peneliti	V	V	V	Balai Besar - Baristand	2019	Selama masih berlaku
151	Jurnal Selulosa	Jurnal hasil libang	V	V	-	BPPI	2019	1 tahun
152	Laporan Hasil-hasil penelitian	Laporan Hasil-hasil penelitian	V	-	-	BPPI	2019	1 tahun
DATA STASTISTIK								
153	Laporan Kinerja Ekonomi dan Sektor Industri	informasi dan gambaran terkait perkembangan sektor industri pada triwulan I, II, III, dan IV serta capaian utama Kementerian Perindustrian th 2019	V	V	-	Biro Perencanaan	2019	1 tahun
154	Financial Highlights	Dewan Pengawasan BLU	V	V	-	Biro Keuangan	2016	Selama masih berlaku
155	Daftar Inventarisasi Barang Produksi Berserikat Komponen Dalam Negeri	Data Inventaris Barang produksi, jenis produksi, spesifikasi produk, nilai TKDN dan tanggal sertifikasi	V	V	-	ULP	2016	Selama masih berlaku
MoU								
156	Letter of Intent antara Kemenperin dengan Tsinghua University tentang People Empowerment on Innovation and Entrepreneurship Leadership for Industry 4.0	Kerjasama di bidang pendidikan kepada top management dalam rangka mendorong perwujudan Industry 4.0	V	V	V	KPAII	2017	Selama masih berlaku
157	Agreement between the Government of Republic Indonesia and the Government of the People's Republic of China on Indonesia-China Integrated Industrial Parks	Koordinasi, fasilitasi, dan konsultasi dalam pembangunan industrial parks.	V	V	V	KPAII	2013	Selama masih berlaku
158	Letter of Intent among MoI Republic of Indonesia and AXIA Materials co.,ltd and Korea Institute of Industrial Technology on Cooperation in the field of research and development, and training to support manufacturing industries.	Improving the utilization of Composite Panel and Application Technology to boost the capacity of the manufacturing industries in Indonesia and Improving the quality of production, developing manufacturing industries of Indonesia in the field of Composite Panel and Application Technology	V	V	V	KPAII	2017	Selama masih berlaku
159	Joint Statement between DG IRIAD and Wakayama Prefectural Govt of Japan on Technical Cooperation and Industrial Development	a. Exchange of information in the field of industrial development and technical cooperation; b. Explore the possibilities of organizing the joint activities such as jointly organizing seminars and exhibitions to promote opportunities for industrial development and technical cooperation; c. Encourage their national entrepreneurs to participate in international fairs/exhibitions and bussiness matching programs for the visiting delegations; e. Exchange of knowledge and expertise to benefit from the experience of both parties in the field of human resource development, especially in dispatching technical assistance; f. Other areas agreed upon by booth parties, in any future legal instrument.	V	V	V	KPAII	2017	Selama masih berlaku
SOP								
160	SOP Hibah	Pedoman pemanfaatan bantuan luar negeri	V	V	V	KPAII	2016	Selama masih berlaku
161	SOP Pameran	Pameran luar negeri di lingkungan Kementerian Perindustrian	V	V	V	KPAII	2016	Selama masih berlaku

No	Judul Kegiatan	Detail Kegiatan	Format Informasi			Penanggung	Waktu	Jangka Waktu
162	SOP Tenaga Ahli	Pedoman penanganan pemanfaatan tenaga asing dalam rangka kerjasama Teknik Luar Negeri di lingkungan Kementerian Perindustrian	V	V	V	KPAII	2014	Selama masih berlaku
163	SOP Pengumpulan dan Pengolahan Informasi Publik	SOP Pengumpulan dan Pengolahan Informasi Publik	V	V	V	Biro Humas	2019	Selama masih berlaku
164	SOP Pengoperasian dan Pemeliharaan Peralatan Laboratorium	Mencakup Standar Pengoperasian dan Pemeliharaan Peralatan Mekanikal & Elektronikal serta langkah kerja	V	V	V	Balai Besar - Baristand	2019	Selama masih berlaku
165	SOP Uji Konsekuensi Informasi yang Dikecualikan	SOP No. 651/ SJ-IND.5/IP/SOP/3/2016 tentang Uji Konsekuensi Informasi yang dikecualikan	V	V	V	Biro Humas	2019	Selama masih berlaku
166	SOP Pelayanan Publik	Peraturan Menteri No. 34/ M-IND/Per/S/2015, tentang Standar Operasional Prosedur Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kem	V	V	V	Biro Humas	2019	Selama masih berlaku
167	Standar Layanan Informasi Publik	Informasi tentang Kumpulan Tata Cara Layanan Informasi Publik	V	V	V	Biro Humas	2019	Selama masih berlaku
MoU								
168	Dokumen dan Sertifikat ISO 17025	Dokumen/ Bahan ISO 17025 tentang Lembaga Laboratorium Uji	V	V	V	Balai Besar - Baristand	2017	Selama masih berlaku
169	Dokumen dan Sertifikat ISO 17065	Dokumen/ Bahan ISO 17065 Tentang lembaga Sertifikasi Produk	V	V	V	Balai Besar - Baristand	2017	Selama masih berlaku
170	Dokumen dan Sertifikat ISO 9001-2015	Dokumen/ Bahan ISO 9001-2015 Tentang Sistem Manajemen Mutu	V	V	V	Balai Besar - Baristand	2017	Selama masih berlaku
171	Surat Perjanjian Kerjasama	Surat perjanjian kerjasama terkait penempatan alumni diklat	V	-	-	BPSDMI	2019	1 tahun
172	Surat-surat perjanjian	Nota Kesepahaman (MOU) tentang Kelitbangan, standardisasi, sertifikasi dan pengujian	V	V	-	UPT	2018	Selama masih berlaku
LAPORAN KEGIATAN								
173	Sistem Akuntansi Barang Milik Negara (BMN)	Laporan pencatatan dan pelaporan asset/ Kekayaan	V	-	-	Biro Keuangan	2019	1 tahun
174	Laporan Pelaksanaan Diklat	Latar belakang diklat, pelaksanaan diklat, evaluasi hasil diklat	V	-	-	UPT Pendidikan	2019	5 tahun
175	Rekap Realisasi Diklat 3 in 1	Rekapitulasi penyelenggaraan diklat beserta penempatan alumni nya	-	V	-	UPT Pendidikan	2019	5 tahun
176	Sambutan dalam diseminasi hasil litbang	Sambutan dalam diseminasi hasil litbang	V	V	V	UPT	2019	1 tahun
177	Laporan hasil kunjungan industri/institusi	Laporan hasil kunjungan industri/institusi	V	V	V	UPT	2019	1 tahun

DAFTAR INFORMASI SERTA MERTA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN

No	Jenis Informasi	Detail Informasi	Format Informasi			Penanggung Jawab Pembuatan	Waktu Pembuatan Terakhir	Jangka Waktu Penyimpanan
			HARDCOPY	SOFTCOPY	ONLINE			
1	Larangan Merokok	Larangan Merokok, Area Kantor Bebas Rokok	V	V	-	Romum	2005	Selama Masih Berlaku
2	Informasi Bahan Kimia Berbahaya GHS	Pengertian GHS, Kategori Bahaya dan Piktogram GHS, aplikasi GHS, Manfaat mengadopsi GHS, sasaran, informasi yang diperlukan pada label GHS, Pemberlakuan GHS di Indonesia, dan regulasi teknis	V	V	V	IKTA	2014	Selama Masih Berlaku
3	Petunjuk keadaan darurat	Petunjuk evakuasi apabila terjadi sesuatu di area laboratorium	V	-	-	Baristand Industri Samarinda	2016	Selama masih berlaku
4	Agenda pameran	Jadwal pameran (diseminasi hasil litbang)	V	V	V	BBPK Bandung	2018	1 tahun
5	Petunjuk keadaan darurat	Petunjuk evakuasi apabila terjadi sesuatu atau keadaan darurat di Lingkungan Gedung BBIHP	V	-	-	BBIHP Makassar	2016	Selama masih berlaku

DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

No	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
1	Biodata pegawai	UU No.14 thn 2008 ttg KIP pasal 17 huruf h		Mengungkap data pribadi yang bersifat rahasia	Tidak terbatas
2	Dokumen/berkas/arsip kepegawaian	UU No.14 thn 2008 ttg KIP pasal 17 huruf h		Mengungkap data pribadi yang bersifat rahasia	Tidak terbatas
3	Identitas PNS/pegawai yang melanggar disiplin dan dijatuhi hukuman disiplin	UU No.14 thn 2008 ttg KIP pasal 17 huruf h		Mengungkap data pribadi yang bersifat rahasia	Tidak terbatas
4	Identitas PNS yang mengajukan ijin perceraian/perkawinan	UU No.14 thn 2008 ttg KIP pasal 17 huruf h		Mengungkap data pribadi yang bersifat rahasia	Tidak terbatas
5	DP 3/SKP PNS	UU No.14 thn 2008 ttg KIP pasal 17 huruf h		Mengungkap data pribadi yang bersifat rahasia	Tidak terbatas
6	Data usulan pengangkatan PNS dalam jabatan struktural	UU No.14 thn 2008 ttg KIP pasal 17 huruf i		Menghambat kesuksesan kebijakan	Sampai dengan pelantikan
7	Arsip dinamis yang menurut sifatnya rahasia	UU No.14 thn 2008 ttg KIP pasal 17 huruf i		Merugikan penyusunan kebijakan	Tidak terbatas
8	Dokumen penawaran kontrak kerjasama	UU No.14 thn 2008 ttg KIP pasal 17 huruf i; Keppres No.54 Tahun 2010 beserta perubahannya		Munculnya persaingan tidak sehat	Selama proses pengadaan
9	Kode akses elektronik	UU No.11 thn 2008 ttg Informasi dan transaksi elektronik pasal 1 angka 16		Penyalahgunaan pihak lain	Tidak terbatas
10	Hasil pemeriksaan keuangan reguler	UU No.14 thn 2008 ttg KIP pasal 6 huruf c ayat 6 dan pasal 6 dan pasal 17 huruf i		Melanggar distribusi LHP	Tidak terbatas
11	Hasil analisis, LHU/ (Laporan Hasil Uji/Kalibrasi) Laboratorium Pengujian dan Kalibrasi	UU No.14 thn 2008 ttg KIP pasal 17 huruf i		Munculnya persaingan tidak sehat	Tidak terbatas
12	Laporan Audit/Assessment ke industri	UU No.14 thn 2008 ttg KIP pasal 17 huruf i		Munculnya persaingan tidak sehat	Tidak terbatas
13	Laporan keuangan tahun berjalan	UU No.17/2003 (Keuangan negara); UU no.1/2004 (Perbendaharaan Negara), UU No.15/2006 BPK		Penyalahgunaan pihak lain	Sampai proses audit selesai
14	Rekening dan transaksi keuangan pegawai	UU No.14 thn 2008 ttg KIP pasal 17 huruf h		Mengungkap data pribadi yang bersifat rahasia	Tidak terbatas
15	Riwayat kesehatan jasmani dan rohani pegawai	UU No.14 thn 2008 ttg KIP pasal 17 huruf h		Mengungkap data pribadi yang bersifat rahasia	Tidak terbatas

16	Hasil evaluasi kinerja, kapabilitas, intelektualitas dan rekomendasi pegawai	UU No.14 thn 2008 ttg KIP pasal 17 huruf h		Mengungkap data pribadi yang bersifat rahasia	Tidak terbatas
17	Dokumen perusahaan yang menjadi pelanggan	UU No.14 thn 2008 ttg KIP pasal 17 huruf b dan UU No. 20 thn 2000 ttg Rahasia Dagang pasal 3 butir 2		Munculnya persaingan tidak sehat	Tidak terbatas
18	Dokumen penawaran lelang	UU No.14 thn 2008 ttg KIP pasal 17 huruf i; Keppres No.54 Tahun 2010 beserta perubahannya		Munculnya persaingan tidak sehat	Selama proses pengadaan
19	Rincian HPS (Harga Perkiraan Sendiri)	UU No. 30 thn 2000 ttg Rahasia Dagang		Munculnya persaingan tidak sehat	Selama proses pengadaan
20	Dokumen kerjasama dengan industri	UU No.14 thn 2008 ttg KIP pasal 17 huruf h		Munculnya persaingan tidak sehat	Tidak terbatas
21	Dokumen kajian dan perancangan AMDAL	UU No.14 thn 2008 ttg KIP pasal 17 huruf i		Munculnya persaingan tidak sehat	Tidak terbatas
22	Rincian Proses Evaluasi uji kompetensi	Pasal 17 huruf h angka 4, Pasal 201 BNSP Pedoman Penilaian Kesesuaian Klausul 7	Mengungkap rahasia pribadi		Selama masih berlaku
23	Proses hingga keputusan hukuman disiplin peserta didik	Pasal 17 huruf a	Menghambat proses hukum dan mengungkapkan identitas informan, pelapor, saksi dan korban		Permanen
24	Proses penerimaan dan biodata calon peserta didik/diklat	Pasal 17 huruf h angka 5	Mengungkapkan rahasia pribadi seseorang		Permanen
25	Proses hasil evaluasi KBM	Pasal 17 huruf h angka 4	Mengungkapkan rahasia pribadi seseorang		Permanen
26	Proses hasil evaluasi diklat	Pasal 17 huruf h angka 4	Mengungkapkan rahasia pribadi seseorang		Permanen
27	Data pribadi pegawai, peserta didik/diklat, dan alumni	Pasal 17 huruf h angka 5	Mengungkapkan rahasia pribadi seseorang		Permanen
28	Dokumen silabus mapel produktif	Pasal 17 huruf b	Persaingan usaha tidak sehat		Selama masih berlaku
29	Dokumen/Arsip PNS yang berkaitan dengan pribadi	1. Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik 2. Pasal 44 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	Mengungkap data pribadi PNS	Melindungi hak dasar manusia (HAM) berdasarkan konstitusi	Dibuka setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari yang bersangkutan
30	Tempat Penyimpanan arsip	1. Undang-Undang No.14 Tahun 2008 Tentang KIP, Pasal 17 huruf i 2. Undang-Undang No.43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan Pasal 66 ayat 3 huruf i	Kehilangan arsip	Melindungi keamanan arsip	Tidak terbatas
31	Dokumen keuangan yang bersifat rahasia antara lain : Dokumen anggaran dan otoritasnya, pencairan anggaran dan surat perjanjian kerja serta	1. Undang-Undang No.14 Tahun 2008 Tentang KIP, Pasal 17 2. Undang-Undang No.43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan Pasal 44 ayat (1) dan (2)	Menghambat Proses penegakan hukum	Menyediakan data lengkap yang di lindungi	Selama masih berlaku
32	Beberapa arsip surat menyurat yang bersifat rahasia	Pasal 44 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	Dapat menghambat proses penyusunan kebijakan	Mengamankan proses penyusunan kebijakan	Selama masih berlaku
		1. Pasal 30 ayat 1 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara			

33	Dokumen Laporan keuangan sebelum di audit	2. Pasal 17 ayat (1) dan Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara	Menghambat proses kebijakan karena adanya pengumuman secara prematur	Membantu mencapai keberhasilan pencapaian pembangunan	Hingga terbitnya laporan keuangan yang telah diaudit
		3. Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum			
34	Dokumen soal dan jawaban ujian	1. Pasal 17 huruf b dan huruf l Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dapat Menyebabkan kebocoran soal dan jawaban ujian	Melindungi keamanan soal dan jawaban ujian	1 (satu) Tahun
		2. Pasal 12 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 10 Tahun 2011 tentang Layanan Informasi Publik			
35	Dokumen nilai pembelajaran siswa persemester	1. Pasal 17 huruf b dan huruf l Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Mengungkap data pribadi siswa	Melindungi hak dasar manusia (HAM) berdasarkan konstitusi	Dibuka saat mendapatkan persetujuan tertulis oleh yang bersangkutan
		2. Pasal 12 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 10 Tahun 2011 tentang Layanan Informasi Publik			
36	Data Ijazah	1. Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Mengungkap data pribadi alumni	Melindungi hak dasar manusia (HAM) berdasarkan konstitusi	Dibuka setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari yang bersangkutan
		2. Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan			
37	Dokumen hasil atau proses penjatuhan hukuman disiplin /pelanggaran etika siswa	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Mengungkap data pribadi siswa	Melindungi hak dasar manusia (HAM) berdasarkan konstitusi	Dibuka saat mendapatkan persetujuan tertulis oleh yang bersangkutan
38	Evaluasi tata kerja ekstrakurikuler	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik	Mengungkapkan rahasia organisasi	Melindungi rahasia organisasi	Dibuka setelah mendapatkan persetujuan dari pimpinan organisasi
39	Dokumen perjanjian/kontrak pengadaan barang/ jasa beserta lampirannya	Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah yang diubah terakhir dengan Peraturan Presiden No. 4 Tahun 2015	Penyalahgunaan dokumen penawaran oleh pihak lain yang tidak berkepentingan	Mengamankan kerahasiaan dokumen pengadaan barang/jasa	Dokumen dapat di buka saat audit
40	Dokumen Proses Pengadaan Barang/Jasa	1. Pasal 17 huruf h angka 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik	Bertentangan dengan prinsip-prinsip pengadaan dan etika pengadaan	Melaksanakan pengadaan barang/jasa sesuai dengan prinsip pengadaan barang/jasa	Dokumen dibuka sampai diketahui pemenang vendornya
		2. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang pengadaan Barang/ Jasa pemerintah sebagaimana terakhir diubah dengan peraturan presiden Nomor 4 Tahun 2015			
		1. Pasal 17 huruf l dan j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik			

41	Rincian Harga Perkiraan Sendiri pada Proses Pengadaan Barang/Jasa	2. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015	Dapat menghambat proses penyusunan kebijakan	Memperlancar proses penyusunan kebijakan barang/jasa	Dokumen dibuka sampai diketahui pemenang vendornya
42	Dokumen soal dan jawaban ujian rekrutmen perusahaan atau Industri yang bekerja sama dengan SMK-SMTI Makassar	Pasal 17 huruf b dan huruf h angka 5 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang keterbukaan Informasi Publik	Dapat Menyebabkan kebocoran soal dan jawaban ujian	Melindungi kebocoran soal ujian	Dibuka saat mendapatkan persetujuan tertulis para pihak
43	Data dan nilai rengking peserta yang mengikuti tes pada perusahaan atau Industri yang bekerja sama dengan SMK-SMTI Makassar	Pasal 17 huruf b dan huruf h angka 5 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang keterbukaan Informasi Publik	Mengungkapkan data pribadi pendaftar	Melindungi hak dasar manusia (HAM) berdasarkan konstitusi	Dibuka saat mendapatkan persetujuan tertulis para pihak
44	Data Pribadi Staff Serta Mitra Kerja sama	1. Passal 44 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 43 2009 tentang Kearsipan 2. Pasal 17 huruf h Nomor 5 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009 tentang Kearsipan	Mengungkapkan pribadi	Melindungi hak dasar manusia (HAM) berdasarkan konstitusi	Dibuka saat mendapatkan persetujuan tertulis oleh yang bersangkutan
45	Pemberhentian PNS dalam Jabatan Struktural	UU no 14 th 2008	Dapat mengganggu proses pnyusunan kebijakan	Mengamankan proses penyusunan kebijakan	Permanen
46	Pemberhentian pegawai kontrak/honorar dari jabatan struktural	UU no 14 th 2008	Dapat mengganggu proses pnyusunan kebijakan	Mengamankan proses penyusunan kebijakan	Permanen
47	Data gaji dan tunjangan PNS	UU no 14 th 2008	Dapat mengungkap data pribadi pegawai	Melindungi hak dasar manusia berdasarkan konstitusi	Dibuka dengan izin tertulis dari Ybs
48	Dokumen hasil atau proses penjatuhan hukuman disiplin	UU no. 14 Tahun 2008	Dapat mengungkap data pribadi pegawai	Melindungi hak dasar manusia berdasarkan konstitusi	Dibuka dengan izin tertulis dari Ybs
49	Dokumen SKP	UU no 14 th 2018			
50	Rincian data tiap perusahaan binaan sektor teknis (alamat, contact person, kapasitas produksi, data produksi, realisasi ekspor-impor, stock, supply-demand, dan rencana investasi.	Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik Nomor 3 tahun 2008 pasal 17 huruf b	Dapat menimbulkan persaingan usaha yang tidak sehat		Ditetapkan berdasarkan Peraturan (Pasal 6 PP No 61 Tahun 2010) Undang-Undang No 14 tahun 2008 Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf b.
51	Rincian data tiap perusahaan yang disubmit untuk permohonan atau usulan insentif, rekomendasi teknis, pertimbangan teknis, dan SIINas.				
52	Rincian data penerima insentif fiskal dan non-fiskal				

53	Data terkait Personal Pegawai (Data Kepegawaian), termasuk - SK Hukuman Disiplin - SK Izin Perkawinan - SK Kenaikan Pangkat - SK Kenaikan Gaji Berkala - SK Mutasi/Kenaikan Jabatan Fungsional - SK Pengangkatan CPNS - SK Pengangkatatan PNS - SK Penyesuaian Gaji Pokok - Berkas Kepegawaian - Daftar Rekening Pegawai - Laporan dan Berita Acara Pemeriksaan dan Penanganan Kasus - Hasil Assesment pegawai - Catatan / Rekomendasi terkait Hasil Kinerja Pegawai		Dapat mengungkap rahasia pribadi		Pihak yang diungkap rahasianya memberikan persetujuan tertulis; dan /atau pengungkapan berkaitan dengan posisi seseorang dalam Jabatan Publik (Pasal 18 ayat (2) UU KIP)
54	Dokumen Pertanggungjawaban Negara dan Laporan Keuangan sebelum diaudit		Dibuka setelah melalui proses audit		Dibuka setelah melalui proses audit
55	Lembar Disposisi Surat Masuk dan Keluar, Nota Dinas	Ditetapkan berdasarkan Peraturan PP no 61 Tahun 2010	Memorandum Internal		
56	Data dan Informasi mengenai Kerjasama atau Perundingan Internasional - Seluruh Laporan Sidang (Confidential) - Seluruh Draft Perundingan/MoU yang belum final - Dokumen perjanjian kerjasama Perindustrian yang belum diratifikasi	Selama jangka waktu yang dibutuhkan untuk perlindungan kepentingan hubungan luar negeri (Pasal 7 ayat 4 PP No 61/2010)	Dapat merugikan kepentingan hubungan luar negeri		Selama jangka waktu yang dibutuhkan untuk perlindungan kepentingan hubungan luar negeri (Pasal 7 ayat 4 PP No 61/2010)